

ANALISIS PELAYANAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SUMBER DAYA AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MADIUN, PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

Oleh:

Karon Suprpto¹, Joko Pramono², Adi Purwanto³

Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi, Surakarta
Jawa Tengah

Email¹: ksuprpto.ks@gmail.com

Email²: masjepe69@gmail.com

Email³: adi.hadinagoro@gmail.com

Abstract

Irrigation Operation and Maintenance cannot be separated from the activities of providing services in the field of agriculture through an irrigation network. The purpose of the study was to analyze the operation and maintenance of irrigation services and to examine the efforts of the UPT SDA of the Public Works and Spatial Planning of Madiun Regency in the service of irrigation operations and maintenance. Validation of data to ensure that between what is observed and researched is appropriate and really exists and that the event actually happened and can be trusted. The process of data analysis in this research by studying and reviewing all available data from various sources obtained from direct observation and interviews. The results showed that the irrigation service operation and maintenance process was not optimal, due to the lack of maintenance of the irrigation network and the lack of operational and maintenance personnel for the irrigation network, causing high maintenance costs, slow irrigation water services to farmers, many damaged sluice gates and widespread theft of water.

Keywords: Maintenance Operations, Irrigation, Tangibles, Qualitative.

Pendahuluan

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) sektor publik adalah sebuah ilmu yang menjelaskan bagaimana cara mengatur hubungan serta peran tenaga kerja atau pegawai secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan bersama baik organisasi, karyawan atau pegawai

maupun masyarakat (Publik). Secara klasik Manajemen Sumber Daya manusia (MSDM) sektor publik telah menjadi bagian penting dari setiap upaya reformasi birokrasi dalam menyajikan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan serta akomodasi berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sampara Lukman yang dikutip oleh Sinambela (2014: 5), pelayanan

adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Menurut AG. Subarsono seperti yang dikutip oleh Agus Dwiyanto (2005:141) Pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat. Menurut Moenir (2015: 26) Bahwa pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya. Hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Menurut Undang – undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan/rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan

administrasi yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam Peraturan Pemerintah No 96 tahun 2012 tentang Pelayanan publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh pelayanan publik.

Terdapat berbagai permasalahan yang ada dalam birokrasi di Indonesia khususnya berkaitan dengan pengelolaan SDM aparatur. Organisasi perusahaan maupun instansi pemerintah yang baik adalah yang telah mampu menciptakan kinerja yang baik. Untuk mencapai kinerja yang baik, maka diperlukan pegawai yang mempunyai daya kerja yang tinggi untuk mengantisipasi peluang dan tantangan lingkungan yang semakin kompetitif dalam pencapaian tujuan organisasi atau instansi, maka pengelolaan sumber daya manusianya harus diarahkan untuk menjadi pemikir dan penentu jalannya organisasi atau instansi secara berkesinambungan (Oktafien & Yuniarsih, 2017; Amri & Ramdan, 2020). Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan

kepentingan. Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumber daya manusianya akan mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam menjalankan kinerja (Amri, 2021).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun, dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sumber daya air dan mempunyai fungsi antara lain melaksanakan kegiatan rutin operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi serta melaksanakan pemantauan sarana dan prasarana sumber daya air.

Pada tahun 2000 - 2015 jumlah Kepala Unit Pelaksana Tehnis ada 6 orang yang didasarkan pada jumlah wilayah Unit Pelaksana Tehnis yang ada di Kabupaten Madiun yaitu Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Caruban, Pilangkenceng, Madiun, Jiwan, Wungu dan Dolopo. Setelah tahun 2020 tepatnya pada tanggal 28 Mei 2018 Unit Pelaksana Tehnis Pengairan berubah menjadi 2 (dua) wilayah UPT dan berganti nama menjadi Unit Pelaksana Tehnis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air (UPTD-PSDA) Wilayah I Uteran yang merupakan gabungan dari UPT Dolopo dan Wungu serta Unit Pelaksana Tehnis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air (UPTD-PSDA) Wilayah II Madiun

yang merupakan gabungan dari UPT Caruban, Pilangkenceng, Jiwan dan Madiun, hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun nomor 28 tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun.

Jumlah Daerah Irigasi sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14 tahun 2015 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi menyatakan bahwa jumlah Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Madiun adalah 334 Daerah Irigasi yang melayani 11.332 ha areal persawahan. Panjang saluran primer 345.318 meter dan saluran sekunder adalah 144.043 meter. Panjang saluran secara keseluruhan adalah 489.361 meter. Sedangkan jumlah bendung adalah 109 buah. Bangunan sadap ada 388 buah. Bangunan Bagi ada 81 buah sedangkan bangunan bagi sadap ada 132 buah.

Dari panjangnya saluran, jumlah bendung, bangunan sadap, bangunan bagi dan bangunan bagi sadap membutuhkan sejumlah petugas pelaksana operasi dan pemeliharaan. Hal ini disebabkan banyaknya tenaga yang sudah purna/pensiun dan belum ada tambahan perekrutan pegawai. Pada tingkatan juru pengairan juga mengalami banyak penurunan, begitu pula pada Petugas Operasi Bendung

(POB), petugas Penjaga Pintu Air (PPA) dan juga pekarya.

Operasi jaringan irigasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dengan kriteria tepat jumlah, waktu dan durasi. Sedangkan pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus. Dengan adanya kegiatan pemeliharaan, kondisi jaringan irigasi akan dikembalikan seperti semula agar berfungsi secara optimal seperti sebelum terjadi kerusakan

Kualitas pelayanan operasi dan pemeliharaan irigasi di Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air (UPT SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun kurang optimal. Dengan adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung layanan operasi dan pemeliharaan irigasi seperti memperbaiki saluran irigasi dan bendungan yang bocor, penggantian pintu air yang rusak, pengerukan sedimen dan pembersihan rumput-rumput liar yang menghalangi saluran irigasi, diharapkan layanan irigasi dapat berjalan dan berfungsi secara optimal. Pemerintah sebagai

penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik.

Pada dasarnya setiap permasalahan pasti memiliki landasan teori pendukung atau penghubung untuk memperkuat masalah. Ada beberapa teori yang dapat membantu proses pemecahan masalah penelitian yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Salah satunya menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (dalam Hardiansyah, 2011). Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen ada indikator kualitas pelayanan yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan yaitu : *Tangibles* (bukti fisik), *Reliability* (kepercayaan), *Responsiveness* (daya tanggap), *Assurance* (jaminan) dan *Emphaty* (empati). Dari latar belakang tersebut diatas maka perlu adanya penelitian tentang bagaimana pelayanan operasi dan pemeliharaan irigasi pada Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan data

primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Data primer pada penelitian ini didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan informan. Beberapa informan antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun sebagai informan kunci dan beberapa informan lain seperti Kepala Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air (UPT SDA) wilayah I dan II serta Juru Pengairan UPT SDA wilayah I.

Selain wawancara dengan informan peneliti juga melakukan pengamatan (observasi) di lapangan. Pengamatan dilakukan setiap hari/jam kerja karena peneliti termasuk salah satu karyawan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air (Kepala Seksi Bina Manfaat). Dengan terjun langsung dalam proses pengumpulan data diharapkan dapat memahami secara mendalam persoalan kurang optimalnya kualitas pelayanan operasi dan pemeliharaan irigasi pada Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air (UPT SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku Modul Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Tingkat Juru Tahun 2017,

buku Pedoman Persiapan Operasi dan Pemeliharaan (POP) Rehabilitasi Jaringan Irigasi, buku manual operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, buku undang-undang serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Data yang dianalisis adalah data yang dikumpulkan pada saat penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data dilakukan untuk mendeskripsikan seluruh data sehingga dapat di pahami dan membuat kesimpulan.

Pembahasan

Kabupaten Madiun adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukota dari Kabupaten Madiun adalah Kecamatan Mejayan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2010. Sebagian gedung-gedung pemerintahan sudah berada di wilayah Caruban yang merupakan bagian dari Kecamatan Mejayan. Gedung pemerintahan lain telah dipindah secara bertahap dari Kota Madiun ke Caruban sejak 2011. Luas wilayah Kabupaten Madiun adalah 1.010,86 Km² atau 101.086 Ha, secara administratif pemerintahan terbagi ke dalam : 15 Kecamatan, 8 Kelurahan, 198 Desa. Secara astronomis Kabupaten Madiun

terletak pada posisi $07^{\circ} 12' - 7^{\circ} 48'$ Lintang Selatan dan $111^{\circ} 25' - 111^{\circ} 51'$ Bujur Timur.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun mempunyai 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis yaitu Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air. Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air (UPT SDA) mempunyai 2 (dua) wilayah administratif yaitu Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air (UPT SDA) Wilayah I Uteran dan Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air (UPT SDA) Wilayah II Madiun.

Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintah yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik. Berdasarkan lampiran 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Jaringan Irigasi) terdiri atas Kepala Ranting / Pengamat / UPTD / Cabang Dinas / Korwi 1 / Mantri / Juru Pengairan, Petugas Operasi Bendung (POB), Petugas Pintu Air (PPA) dan

Pekerja / pekarya / pekerja saluran (PS)

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun nomor : 28 tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air (UPT SDA) Wilayah I Uteran membawahi wilayah eks. UPT Pengairan Wungu dan eks. UPT Pengairan Dolopo. Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air (UPT SDA) Wilayah II Madiun membawahi wilayah eks. UPT Pengairan Jiwan, eks UPT Pengairan Madiun, eks. UPT Pengairan Caruban dan eks. UPT Pengairan Pilangkenceng. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kabupaten Madiun mempunyai 334 Daerah Irigasi. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Dengan luas lahan yang teraliri air irigasi sebesar 11.332 ha. Dalam mengaliri lahan pertanian seluas 11.332 ha tersebut tentunya menggunakan dn melalui suatu jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan

dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi primer di Kabupaten Madiun sepanjang ± 345.318 meter dan jaringan irigasi sekunder adalah ± 144.043 meter. Panjang jaringan irigasi secara keseluruhan adalah ± 489.361 meter. Jumlah bendung adalah 109 buah. Bangunan sadap ada 388 buah. Bangunan bagi ada 81 buah sedangkan bangunan bagi sadap ada 132 buah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Elektronik Pengelolaan Aset Irigasi dan Kinerja Sistem Irigasi (e-PAKSI) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun dapat diperoleh gambaran tentang saluran baik primer maupun sekunder, bangunan baik bendung, bangunan bagi, bangunan sadap, bangunan bagi sadap dengan olahan data sebagai berikut :

a) Saluran Primer dan Sekunder

Tabel – 1 Kondisi (%) Saluran Primer dan Sekunder

Kondisi	Sal. Primer		Sal. Sekunder	
	% Tk. kerusakan	% kondisi baik	% Tk. kerusakan	% kondisi baik
Baik	4	92	10	92
Rusak Ringan	18	82	30	84
Rusak Sedang	34	74	29	75
Rusak Berat	60	55	42	55

Sumber : IKSI DPUPR Kab. Madiun Tahun 2021

Tingkat kerusakan < 10% maka kondisi baik > 90%

Tingkat kerusakan antara 10% - 20%, kondisi baik antara 80% - 90%

Tingkat kerusakan antara 21% - 40%, kondisi baik antara 60% - 80%

Tingkat kerusakan > 40%, kondisi baik < 60%

Panjang Saluran Primer ± 345.318 meter maka kondisi jaringan yang rusak berat sepanjang ± 207.190 meter

Panjang Saluran Sekunder ± 144.043 meter maka saluran yang rusak sepanjang ± 60.498 meter

Berdasarkan hasil data diatas maka saluran primer dalam kondisi Rusak Berat dengan tingkat kerusakan > 40%,

Ada beberapa penyebab terjadinya kerusakan bangunan antara lain karena bencana, umur bangunan yang sudah lama dan yang sering dilakukan adalah banyaknya petani yang merusak/melobangi saluran untuk mengalirkan air di lahan

sawahnya, biasanya pada waktu musim kemarau.

b) Bangunan

Tabel – 2 Kondisi (%) Bangunan

Kondisi	Bendung		B. Sadap		B. Bagi		B. Bagi sadap	
	% Tk. kerusakan	% kondisi baik						
Baik	8	91	2	92	10	93	2	91
Rusak Ringan	11	82	13	82	14	83	18	81
Rusak Sedang	38	73	31	74	35	77	32	76
Rusak Berat	30	54	-	-	47	53	41	56

Sumber : IKSI DPUPR Kab. Madiun Tahun 2021

Tingkat kerusakan < 10% maka kondisi baik > 90%

Tingkat kerusakan antara 10% - 20%, kondisi baik antara 80% - 90%

Tingkat kerusakan antara 21% - 40%, kondisi baik antara 60% - 80%

Tingkat kerusakan > 40%, kondisi baik < 60%

Jumlah bendung adalah 109 buah maka jumlah bendung yang rusak berat sejumlah 32 buah bendung.

Bangunan sadap ada 388 buah dengan kondisi rusak sedang sejumlah 120 buah.

Bangunan bagi ada 81 buah dengan kondisi rusak berat sejumlah 38 buah

Bangunan bagi sadap ada 132 buah, kondisi rusak berat sejumlah 18 buah.

c. Pintu Air

Tabel – 3 Kondisi (%) Pintu Air

Kondisi	Bendung		B. Sadap		B. Bagi		B. Bagi sadap	
	% Tk. kerusakan	% kondisi baik						
Baik	8	91	2	92	10	93	2	91
Rusak Ringan	11	82	13	82	14	83	18	81
Rusak Sedang	38	73	31	74	35	77	32	76
Rusak Berat	30	54	-	-	47	53	41	56

Sumber : IKSI DPUPR Kab. Madiun Tahun 2021

Jumlah Pintu Air baik di bendung, bangunan sadap, bangunan bagi dan bangunan bagi sadap sejumlah 710 buah. Kerusakan pada pintu mencapai 33% dengan kategori sedang yaitu sejumlah 234 buah pintu. Kerusakan pintu diakibatkan karena usia pintu yang sudah lama juga adanya pengrusakan pintu yang dikarenakan kurangnya pengawasan dari petugas operasi di Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air (UPT SDA).

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang saling berhubungan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan fungsi jaringan irigasi agar dapat bermanfaat dalam memenuhi hajat hidup masyarakat.

Pelaksanaan operasi jaringan irigasi merupakan salah satu upaya pengaturan air untuk jaringan irigasi dan pembuangannya, kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, penyusunan rencana tata tanam, penyusunan rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu / bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi kegiatan. Sedangkan, pemeliharaan jaringan irigasi merupakan upaya dalam menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik untuk memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

Dengan melihat data-data diatas dapat dikatakan bahwa kerusakan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya sangat berpengaruh terhadap layanan air irigasi pada petani.

Selain kerusakan yang terjadi pada bangunan irigasi beserta pelengkapanya faktor yang lain mempengaruhi adalah kurangnya jumlah petugas Operasi dan Pemeliharaan di lapangan berdampak terhadap penurunan kinerja petugas OP di lapangan. Penurunan kinerja yang terjadi pada Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air (UPT SDA) Dinas PUPR Kabupaten Madiun adalah pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tidak berjalan optimal, kurang terpeliharanya jaringan irigasi yang menyebabkan tingginya biaya pemeliharaan, layanan kepada masyarakat berjalan lambat, banyaknya kerusakan pintu air dan maraknya pencurian air.

Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air (UPT SDA) Wilayah I secara administrasi meliputi 6 Kecamatan dan 40 desa dengan rincian Kecamatan Wungu 7 desa, Kecamatan Dagangan 12 desa, Kecamatan Kare 5 desa, Kecamatan Dolopo 9 desa, Kecamatan Geger 2 desa dan Kecamatan Kebonsari dengan 5 desa. Jumlah Daerah Irigasi adalah 238 dengan luas areal \pm 5.672 ha.

Tabel – 4 Kondisi Tenaga Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air (UPT SDA) Wilayah I

Nama Petugas	Kondisi saat ini	Kebutuhan	Kekurangan
Kepala UPT	1	1	-
Ka. Tata Usaha	1	1	-
Juru Pengairan	4	8	4
Petugas Operasi Bendung (POB)	-	42	42
Petugas Penjaga Pintu Air (PPA)	-	63	63
Pekarya	-	53	53

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DPUPR Kab. Madiun

Unit Pelaksana Tehnis Sumber Daya Air (UPT SDA) Wilayah II secara administrasif terdiri atas 8 kecamatan dan 54 desa, dengan rincian Kecamatan Gemarang 7 desa, Kecamatan Saradan 12 desa, Kecamatan Madiun 9 desa, Kecamatan Kare 4 desa, Kecamatan Wonoasri 4 desa, Kecamatan Pilangkenceng 7 desa, Kecamatan Mejayan 3 desa dan Kecamatan Balerejo 7 desa. Jumlah Daerah Irigasi 129 dengan luas areal ± 5.108 ha.

Tabel – 5 Kondisi Tenaga Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air Wilayah II

Nama Petugas	Kondisi saat ini	Kebutuhan	Kekurangan
Kepala UPT	1	1	-
Ka. Tata Usaha	-	1	1
Juru Pengairan	9	23	14
Petugas Operasi Bendung (POB)	-	67	67
Petugas Penjaga Pintu Air (PPA)	-	87	87
Pekarya	-	110	110

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DPUPR Kab. Madiun

Berdasarkan data serta kondisi lapangan saat ini, dapat diketahui besarnya kebutuhan tenaga operasi dan pemeliharaan di Unit

Pelaksana Teknis Sumber Daya Air (UPT SDA) adalah sebagai berikut:

Tabel – 6 Kebutuhan Tenaga OP pada UPT SDA

No	Tenaga Operasional dan pemeliharaan	Wilayah I	Wilayah II	Kebutuhan total per wilayah	Permen PUPR no 12/2015 (eksploitasi dan pemeliharaan JI)
		Jumlah	Jumlah		
1	Kepala UPT	-	-	-	1 orang +5 staff per 5.000 – 7.500 Ha
2	Ka. Tata Usaha	-	1	1	-
3	Mantri/Juru pengairan	4	14	18	1 orang per 750 – 1.500 Ha
4	Petugas Operasi Bendung (POB)	42	67	109	1 orang per bendung, dapat ditambah beberapa pekerja untuk bendung besar
5	Petugas penjaga Pintu Air (PPA)	63	87	150	1 orang per 3 – 5 bangunan sadap dan bangunan bagi pada saluran berjarak antara 2 - 3 km atau daerah layanan 150 sd. 500 ha
6	Pekerja/pekerja Saluran (PS)	53	110	163	1 orang per 2-3 km panjang saluran

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DPUPR Kab. Madiun

Melihat luasnya wilayah yang harus terlayani air irigasi jika dibandingkan dengan jumlah tenaga

yang ada semestinya belum memadai. Sebagai contoh Petugas Penjaga Pintu Air (PPA) yang

keberadaannya masih kosong, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap layanan irigasi pada lahan petani. Demikian juga dengan Pekarya yang bertugas membersihkan saluran dari sampah, kotoran dan juga membersihkan rumput yang ada di

Penutup

Operasi dan Pemeliharaan Irigasi tidak bisa terlepas dari kegiatan pemberian pelayanan dibidang pertanian melalui suatu jaringan irigasi. Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis pelayanan operasi dan pemeliharaan irigasi serta mengkaji upaya Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air (UPT SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun dalam pelayanan operasi dan pemeliharaan irigasi. Pengabsahan data untuk menjamin bahwa antara yang diamati dan diteliti telah sesuai dan benar-benar ada serta peristiwa tersebut memang benar-benar terjadi dan dapat dipercaya. Proses analisa data pada penelitian ini dengan cara mempelajari dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelayanan operasi dan pemeliharaan irigasi berjalan kurang optimal, karena kurang terpeliharanya jaringan irigasi dan kurangnya tenaga Operasi dan Pemeliharaan jaringan

tepi saluran irigasi saat ini dalam kondisi kosong. Hal inilah yang menyebabkan terlambatnya respon petugas dalam menanggapi situasi dan kondisi dilapangan dalam hal kebutuhan air irigasi.

irigasi sehingga menyebabkan tingginya biaya pemeliharaan, layanan air irigasi pada petani berjalan lambat, banyaknya pintu air yang rusak serta maraknya pencurian air.

Upaya yang telah dilaksanakan selama ini adalah menerapkan tugas ganda pada juru pengairan seperti contoh juru merangkap tenaga Penjaga Pintu Air (PPA) ataupun juga sebagai Pekarya. Selain upaya tersebut juga perlu adanya skala prioritas dalam rehabilitasi fisik bangunan ataupun saluran. Dan yang tidak kalah penting adalah penambahan petugas operasi dan pemeliharaan irigasi melalui rekrutment petugas lewat seleksi CPNS, PPPK dan tenaga harian lepas dengan mengutamakan tingkat kebutuhan.

Daftar Pustaka

Amin, Muamin; M. Agung Wibowo

Dan Pranoto Samto Atmojo. 2016.

“Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Mutu Terhadap Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan (Studi Kasus: Tugas

- Pembantuan Operasi Dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Kedung Asem Dan Daerah Irigasi Bodri Provinsi Jawa Tengah)". Media Komunikasi Teknik Sipil. Jurnal Ilmu dan Terapan Bidang teknik sipil. Volume 22, No. 1
- Bungin Burhan. 2015. Penelitian Kualitatif Edisi Kedua. Jakarta: Prenada. Media Group
- Creswell, John, W. 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lembaga Administrasi Negara (1998). *Pelayanan Umum*.
- Hasibuan (2016:21). Fungsi manajemen sumber daya manusia
- Henry (2004: 290-291), peran dominan MSDM sektor publik yang telah mewarnai birokrasi Amerika Serikat (AS)
- Hidayat, Guswakhid, 2013. Tesis. "Kajian Optimalisasi Dan Strategi Sumber Daya Air Di Kabupaten Rembang Jawa Tengah". Universitas Diponegoro
- Lijan Poltak S (2006:5), tentang Publik
- Moenir (2015: 27) tentang Pelayanan Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985), analisis kepuasan konsumen
- Ritonga, Dedy S. 2013. Tesis. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kinerja Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Sungai Ular". Universitas Sumatera Utara.
- Sampara Lukman yang dikutip oleh Sinambela (2014 :5) definisi pelayanan
- Subarsono AG dalam Agus Dwiyanto (2005:141) definisi Pelayanan publik
- Permen PU PR RI No. 12/PRT/M/2015. Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Pedoman Persiapan Operasi dan Pemeliharaan (POP) Rehabilitasi Jaringan Irigasi
- Peraturan Bupati Madiun nomor 28/2018. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air DPUPR Kabupaten Madiun
- Peraturan Pemerintah No 96 tahun 2012, definisi Pelayanan publik
- Undang – undang No 25 Tahun 2009, pelayanan publik
- Modul. 2017. Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Tingkat Juru Tahun 2017